

SKRIPSI
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

NUR AISYAH
NIM 105730505614



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR.**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

NUR AISYAH

105730505614

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, sehingga Skripsi dapat terselesaikan oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan karuniaNya maka Skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, oleh karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian.
3. Suami Tercinta, yang telah senang tiasa mendampingi dan memberikan semangat dalam hari hariku dalam penyusunan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya sehingga sampai tahap akhir ini, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

5. Serta saudara,sahabat dan teman tersayang tanpa semangat dan dukungan kalian serta bantuan yang tak mungkin aku lupakan serta kenangan kita selama masih di bangku kuliah akan aku kenang selamanya.

MOTTO

Hadapilah segalanya dengan senyum yang terindah

Kemarin adalah pengalamanku, hari ini adalah perjuanganku dan hari esok adalah impianku, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, jadikanlah setiap detik penuh makna bagimu.

Kesabaranmu adalah kunci kesetiaanku, kejujuranmu adalah kunci kepercayaanku, dan keikhlasan adalah kunci keimananku.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar".


Nama Mahasiswa : Nur Aisyah
No. Stambuk/ NIM : 105730505614
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis USniversitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Idham Khalid, SE., MM
NIDN. 0931126103

Pembimbing II

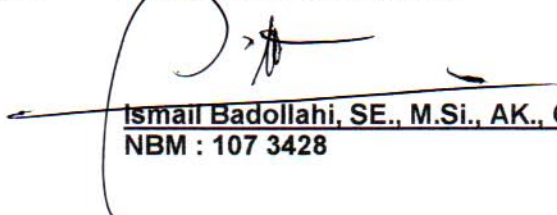

Muttiarni, SE., M.Si
NIDN. 0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA.CSP
NBM : 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung igra lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **NUR AISYAH**, NIM : **105730505614**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM.AK.CA.CPA(.....)
2. Faidul Adzim, SE., M.Si (.....)
3. Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC (.....)
4. Drs. H. Hamzah Limpo, M. Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung igra lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aisyah
Stambuk : 105730505614
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar."

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah di ujikan pada tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 31 Agustus 2018

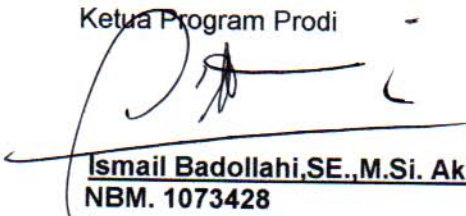
Yang Membuat Pernyataan,




Nur Aisyah

Diketahui Oleh :

Ketua Program Prodi


Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA
NBM. 1073428

Dekan


Ismail Rosulong, SE., MM
NBM. 903078



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti di berikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis Skripsi yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimah kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Kamaruddin dan Ibu Halima yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah di berikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rosullong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.Ca, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dosen Dr. Idham Khalik,SE.,MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Dosen selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak /Ibu Dosen dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
9. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran , motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Hag, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 31 Agustus 2018

Nur Aisyah

ABSTRAK

NUR AISYAH, 2018. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I Dr.Idham Khalik, SE.MM dan Pembimbing II Muttiarni, SE.,Msi.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan salah satu pegawai dari bagian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Takalar sudah sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sejak tahun 2015, merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Takalar dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelolah keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Kata kunci: Penerapan, standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, dan Laporan Keuangan

ABSTRAK

NUR AISYAH, 2018. *The Standardization of Government Accounting Standards on the quality of the Takalar District Government Financial Statements*, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Dr. Idham Khalik, SE.MM and Advisor II Muttiarni, SE., Msi

The purpose of this study is to apply the government accounting standard to the quality of the Takalar district government financial report. Data collection techniques are done by observation and indepth interview with one of the employees of the financial management agency of Takalar districk. The results of data collection in the analysis with qualitative methods using a descriptive approach. The results of the research indecate that the Takalar district government fully implemented accounting standards based on government accruals since 2015, is a reflection of a formality. It is supported by the existence of government regulations that require for all local governments including Takalar district government in applying accrual government based accounting standards. The complrxity of financial statements becomes a major factor in the attitude of financial management tackle resistant Takalar government in the implementation of accounting of accounting standards governance based on accrual.

Keywords : sustainability, government accounting standards, accrual basis, Takalar district, area fully implemented.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xi
<i>ABSTRAK</i>.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan teori.....	5
B. Tinjauan Empiris	17
C. Kerangka Konseptual.....	25

D. Hipotesis.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	28
E. Jenis Data, Sumber Data.....	29
F. Metode Analisis Data.....	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	31
B. Hasil Penelitian	35
C. Pembahasan.....	49
BAB V. PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.2	LRA	36
Tabel 2.3	LPSAL	38
Tabel 2.4	L. Neraca	39
Tabel 2.5	L. Operasional	40
Tabel 2.6	L. Arus Kas	42
Tabel 2.7	L. Perubahan Ekuitas	44
Tabel 2.8	PSAP	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	26
Gambar 2.2	Struktur Organisasi BPKD	32
Gambar 2.3	LRA	37
Gambar 2.4	LPSAL	38
Gambar 2.5	Neraca	40
Gambar 2.6	L. Operasional	41
Gambar 2.7	L Arus kas	43
Gambar 2.8	L P Ekuitas	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar 2015-2016	79
2. laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar 2015-2016	82
3. laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar 2015-2016	84
4. laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar 2015-2016	85
5. laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar 2015-2016	86
6. laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar 2015-2016	89
7. Daftra Pertanyaan Wawancara.....	92
8. Surat Izin Meneliti.....	93
9. Dokumentasi	94
10. Kartu Kontrol	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini mendorong kita mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat.

Setiap kabupaten di berikan kekuasaan dan dan kewenangan untuk menata dan mengelola daerahnya masing- masing. Sebagaimana pada daerah Kabupaten Takalar dalam Penetapan Peraturan Daerah adalah sebagai salah satu tugas Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengandung makna dan hasrat untuk lebih memacu pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin meningkat pada saat ini.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai persyaratan dan kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah. PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonomi Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Friska .L : 2015)

Dengan tujuan mengatur penyajian laporan keuangan secara umum. Kemudian mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus di audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sebelum di sampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah Kab. Takalar kepada DPR/DPRD untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal maka perlu adanya ketelitian dan ketekunan dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan. Susilawati (2014) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah bersifat positif terhadap kualitas laporan keuangan Demikian juga penelitian yang dilakukan M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. dan Sri Pancawati Martiningsih, (2016) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh atas laporan keuangan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat di definisikan masalah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu : “ Bagaimana penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Takalar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Memberikan dukungan atau kemungkinan tolakan terhadap teori dan hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan ide, gagasan pemikiran dan atau saran yang dapat memberikan dorongan ke arah yang lebih baik di masa datang terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Takalar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar bagi pelaksanaan teknik –tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan prakteknya yang sudah di terima umum karena kegunaan dan kelogisannya. Standar atau tekniakuntansi adalahperaturan khusus yang di jabarkan dari prinsip dasar akuntansi, yang mengatur tentang bagaimana standar perlakuan pencatatan dan pelaporan terhadap transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan (Heri 2013 :77)Alasan pentingnya standar akuntansi yang baik yaitu :

1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan kegiatan perusahaan yang dapat di percaya kebenarannya dan memiliki daya banding
2. Memberikan pedoman (arahan) bagi akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya secara hati –hati dan independen.
3. Memberikan data base kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak penghasilan, peraturan tentang perusahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efesiensi ekonomi, serta tujuan –tujuan makro lainnya.
4. Menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Dengan semakin banyaknya standar yang di terbitkan, maka akan semakin banyak pula terjadi kontroversi.

2. Pengertian Standar Akuntansi Publik

Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Menurut (Heti 2005: 15) Standar akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal suatu negara. Faktor penting dalam pembentukan standar akuntansi adalah derajat keterlibatan pemerintah dalam ekonomi. Sistem ekonomi menurut derajat keterlibatan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu :

- *Total government control*
- *Completely free market system*

Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan bagi semua yurisdiksi. Manfaat Standar Akuntansi Sektor Publik yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan.
- b) Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.
- c) Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan.

- d) Mengusahakan harmonisasi antar yuridiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah lebih luas dan kompleks di bandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleknya lingkungan yang mempengaruhi lembaga- lembaga publik tersebut (Mardiasmo 2009:1).

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005) dalam Kusumah (2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan saat ini oleh instansi pemerintah dikuatkandalam PP No.24 Tahun 2005, SAP ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan yang pertama di indonesia terbit pada tahun 2005 yang di atur dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan yang di terbitkan tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Kemudian pada tahun 2010 di lakukan pembaruan sehingga muncul standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (11) PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Namun, penerapan PP No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan mulai tahun 2015. Permendagri No. 64 Tahun 2013 menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya akuntansi anggaran.

2. Akun ekuitas diklasifikasikan sebagai: Ekuitas, Ekuitas SAL, dan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.
3. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan LRA selalu dilawankan dengan akun Estimasi perubahan SAL.
4. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD) adalah: Neraca, LRA, LO, LPE, dan CaLK. Sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat ke enam laporan keuangan SKPD namun ditambah dengan Laporan Arus Kas
5. Pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran.
6. Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selalu berkaitan dengan dikeluarkannya kas. Ketika sudah timbul kewajiban, maka beban harus segera.

Menurut Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar namun sebagaimana dalam perusahaa ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Selanjutnya, Menurut (Tanjung 2015:2) dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan transaksi pendapatan, belanja, dan aset selain kas yang terjadi lingkungan satuan kerja proses pencatatan tersebut di lakukan oleh

pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode, dari catatan tersebut.

4. **Basis Akrua**

Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

PP 24 Tahun 2005 : Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua

SAP adalah prinsip- prinsip akuntansi yang di terapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP di nyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) merupakan SAP yang di beri nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku (Siregar 2017 : 104). Karakteristik pokok standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah :

1. Jumlah pernyataan standar

Pernyataan standar meliputi SAP 1 tentang penyajian laporan keuangan PSAP tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP tentang Catatan atas laporan keuangan, PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan PSAP tentang Akuntansi Investasi, PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, perubahan kebijakan

akuntansi dan operasi yang tidak di lanjutkan, serta PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

2. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang di gunakan adalah basis kas menuju akrual. Berdasarkanbasis ini, pendapatan, belanja dan pembiayaan di catat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, kewajiban, dan ekuitas di catat berdasarkan basis akrual

- a. Laporan keuangan pokok meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan keuangan kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Informasi keuangan yang di sediakan adalah aset, kewajiban, pendapatan, pembiayaan, dan arus kas.

5. Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

6. Faktor-Faktor Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

Menurut pendapat Mahmudi (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Rahmansah (2012) menyatakan bahwa faktor yang diduga sangat mempengaruhi keefektifan dari penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dibedakan atas faktor yang bisa

dikendalikan oleh pemerintah dan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang terjadi begitu cepat. Menurut Febiani (2014) dalam mencapai efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yaitu sumber daya manusia yang berkompeten, komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana dalam membantu penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bustami, L (2015) menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat di pahami dan dapat di bandingkan, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang di hasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas di perlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Jika pemerintahan menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip – prinsip standar akuntansi pemerintahan maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik pula.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintah
 - a. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Akrua) menyebutkan bahwa peranan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antar Generasi
5. Evaluasi Kinerja

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Halim, 2013: 20).

- b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2007: 81) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD

sebagai PPKD/BUD. Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

c. Laporan posisi keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan di antara unsur – unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain untuk menilai (Bastian 2010):

1. Kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan.
2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

8. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Kata “Penerapan” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menerapkan, melaksanakan suatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan

pengertian tersebut bila di kaitkan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan SAP merupakan pelaksanaan atau implementasi 12 (dua belas) pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaannya, teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik dan prinsip) praktik yang sudah di terima oleh umum karena kegunaannya dari kelogisannya, Dan standar itu adalah Standar Akuntansi. Standar Akuntansi mencakup peraturan dan prosedur yang sudah di susun dan di sahkan oleh lembaga resmi.

Standar Akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah pusat/daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah hal ini sesuai dengan pernyataan dalam PP NO. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa” Standar Akuntansi Pemerintahan kemudian di sebut SAP, adalah prinsip- prinsip akuntansi yang di terapkan dalam penyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Sedangkan hubungan SAP dengan Kualitas Laporan Keuangan, lebih lanjut tertera dan termuat jelas dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dalam pengaturan , menjelaskan: “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan

yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”

Seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Dari pernyataan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP tersebut di atas jelas diuraikan bahwa SAP bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan atau informasi yang lengkap dan andal yang berarti untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hubungan tersebut diperkuat oleh Belkaoui (2000) yang menyatakan bahwa “Standar Akuntansi bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat dibandingkan”.

B. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, Dwi Seftihani Riana tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan umumnya penerapan standar akuntansi pemerintah Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. dan Sri Pancawati

Martiningsih tentang “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Namun penelitian yang di lakukan oleh Fitria Ayu Lestari Niu dan Herman Karamoy dan Steven Tangkuman tentang “Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu”. Dari penelitian ini dapat bahwa DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 , Perbedaan antara PP No. 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual penuh yaitu terletak pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan dimana pencatatan/ penjurnalan transaksi akan dibedakan menjadi 2 jenis jurnal yaitu jurnal anggaran dan jurnal finansial.

Begitu pula Penelitian yang di lakukan oleh Friska Langelo dan David Paul Elia Saerang dan Stanly Winylson Alexander tentang “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung”. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa Pemkot Bitung sebagai salah satu

entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual. Kendala dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010, tentang SAP pada Pemkot Bitung antara lain, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD, kesiapan perangkat pendukung (*tools*) dalam hal ini SIMDA yang belum teruji untuk penerapan SAP Berbasis Akrual, masih kurangnya BinteK atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi, serta merubah *mindset* pejabat penatausahaan keuangan di SKPD yang masih sangat bergantung pada BPKBMsD.

Serta Penelitian A. Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu termasuk kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah yang terbagi kedalam 2 indikator yang terdiri dari 15 pernyataan.

Penelitian Eliyada Herwijani, Sukirman tentang “Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan”. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa pertama, Secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akrual sudah baik karena adanya dukungan dari aspek komunikasi, sumber daya, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan struktur organisasi; dan kedua, Penerapan sistem akuntansi akrual di Itjen

Kemenkeu sudah dilakukan dengan sangat memuaskan dan mendapatkan nilai sebesar 93,40%.

Penelitian Sony Lamonisi tentang ” Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tomohon”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kota Tomohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian Ezra Paula Mentu dan Jullie J. Sondakah tentang “ Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut”. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa Dalam tahun anggaran 2014 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam tahun anggaran 2015 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penelitian Engson Qinaris Jaladri dan Ikhsan Budi tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua”. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sangat efektif hal itu ditunjukkan pada 4 faktor yang mempengaruhi yaitu terdiri dari Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi.

Penelitian Socrates Lalom Bombuida dan Jantje Tinangon tentang “ Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Kepulauan Talaud”. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan serta melaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	NamaPeneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Susilawati, Dwi S,R Tahun 2014 , Vol XI, No. 1, ISSN : 1693-4482	Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan

		Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	karena menggambarkan variabel-variabel penelitian dan mengamati hubungan variabel-variabel tersebut dari hipotesis yang telah dibuat secara sistematis melalui pengujian statistik (Sugiyono, 2010:147)	Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 13%.
2.	M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. dan Sri Pancawati Martiningsih, tahun 2016 Volume 9 (1) P, -ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Pengumpulan data dilakukandengan menggunakanmetodedistribusi langsung (<i>direct distribution method</i>).	Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
3.	Fitria Ayu Lestari Niu dan Herman Karamoy, Tahun 2014, Vol.2 No.4, ISSN 2303-1174	Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu	Jenis penelitian bersifat deskriptif, Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Metode analisis yang digunakan adalah	DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpeda

			mpenelitianinia dalammetodea nalisisdeskripti f.	manpadaPermen dagri No. 13 Tahun 2006
4.	FriskaLangelo dan David Paul liaSaeran g, Tahun 2015, Vol.3 No.1, ISSN 2303- 1174	Analisis Penera panStandarAku ntansiPemerinta hanBerbasisAkr ualDalamPenyaj ianLaporanKeua nganPadaPeme rintah Kota Bitung.	Metodeanalisis data yang digunakan,Tek nikpengumpul an data yang digunakandala mmetodestudil apanganinime nggunakantiga carayaitustudik epustakaan, pengamatan/o bservasidanwa wancaralangsu ng.	PemkotBitungseb agaisalahsatuenti taspelaporan, dalammenyajikanl aporankeuangan nyamasihberdasa rkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (Cash Toward Acrua) dan/atauBerbasis KasMenujuAkrual .
5.	A. DahriAdiPatra, LantengBusta mi, Tahun 2015 , Vol. 02 No. 01, Halaman 1-9, ISSN 2339- 1502	PengaruhPener apanSistemAku ntansiKeuangan Pemerintah Daerah TerhadapKualita sLaporanKeuan ganPemerintah Daerah	Berdasarkan populasi dan sampel. Pengujianmen gunakanMeto deanalisiskorel asiRank Spearman	Bahwasecarakes eluruhansystema kuntansikeuanga npemerintahdaer ah di dinaskehutanank abupatenluwuter masukkategori sangatbaik.
6	Eliada Herwiyanti, Sukirman, Tahun 2017, Vol. 19, No. 1, Mei 2017, 13- 23 ISSN 1411-0288	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik survey, sampel yang digunakan adalah metode <i>purposive sampling</i>	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.;
7	Sony Lamonisi, Tahun 2016, Vol.4 No.1, ISSN 2303- 1174	AnalisisPenerap anStandarAkunt ansiBerbasisAkr ualPadaPemer intah Kota Tomohon	Jenispenelitian yang digunakanadal ahpenelitiande skriptifdengan pendekatanku alitatifinterpreti	Dengandikeluark annyaperaturanp emerintahnomor 71 tahun 2010 tentangstandarak untansipemerinta hanberbasisakrua

			f	Isignifikansiperan pemerintahandalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata
8	Ezra Paula Mentu dan Jullie J. Sondakh, Tahun 2016, Vol.4 No.1, ISSN 2303-1174	Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Dalam tahun anggaran 2014 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
9.	Engson Qinaris Jaladri Dan Ikhsan Budi Riharjo, Tahun 2016, Volume 5, Nomor 11, ISSN : 2460-0585	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Metode pengambilan sampel adalah <i>purposive sampling</i> , Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sangat efektif hal itu ditunjukkan ada 4 faktor yang mempengaruhi yaitu terdiri dari Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
10.	Socrates Lalombombuida dan Jantje Tinango	Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	1. Data Kualitatif 2. Data Kuantitatif	DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan

	n, Tahun 2014, Vol.2 No.1, ISSN 2303-1174	rah PadaDinasPendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) KabupatenKepulauan Talaud		nbaikuntukakuntansipendapatansertamelaporkankepadaalaporankeuanganPemerintah Daerah KabupatenKepulauan Talaud sesuaidenganPeraturanPemerintah No.24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintahanbaikuntukJurnal, BukuBesar, NeracaSaldo, JurnalPenyesuaian, NeracaSaldoSetelahPenyesuaianJurnalPenutup.
--	---	---	--	---

C. Kerangka konseptual

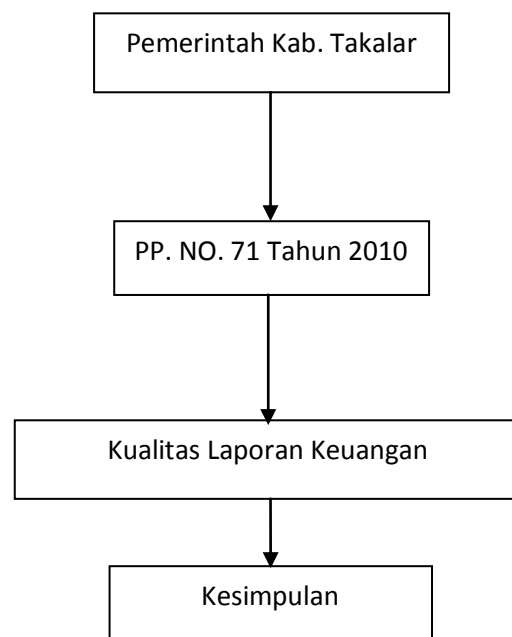
Keuangan daerah perlu di kelolah secara tertib dan sitematis sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku, di sertai adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sehingga keefektifan, keefesienan, dan keekonomisan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah dapat tercapai. Intinya bahwa keuangan daerah merupakan objek di akuntansi sektor publik (pemerintah) dimana dalam akuntansi sektor publik data yang di gunakan untuk memberikan informasi mengenai pertanggung jawaban, transparansi,transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba.

Suatu pengelolaan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari bidang akuntansi, hal ini di maksud untuk menyediakan suatu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang akurat, dapat di percaya dan

tepat waktu, serta menciptakan adanya pemerintahan bersih, berwibawa. Standar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah pedoman, atau prinsip –prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjaminkonsistensi dalam pelaporan keuangan.

Secara skematik, kerangka pemikiran dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar Bagan 2.1



D. Hipotesis

Diduga bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kab. Takalar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif . penelitian deskriptif menurut adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini : untuk membuat deskriptif / gambaran, melukis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat- sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Takalar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Takalar dengan alasan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Standar Akuntansi di Kabupaten Takalar penulis juga berdomisili di Takalar sehingga memudahkan dalam mengambil data penelitian ini di laksanakan selama 2 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Juli 2018.

C. Populasi dan Sampel

Populasidalam berupa Responden yang di beri Koesioner atau di wawancarai, yang menjadi objek penelitian yaitu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Takalar (laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan) yang ada di pemerintah Kabupaten Takalar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini di ambil berasal dari data laporan keuangan pemerintah khususnya laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun 2016 pada Pemerintah Kab. Takalar bagian Kantor BPKD.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu :

1. Penelitian lapangan
 - a. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang di peroleh dengan cara Tanya jawab langsung dengan Bapak Kamaruddin, S.Sos selaku Subbagian Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu : Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Takalar.
 - b. Dokumentasi, peneliti di lakukan dengan menelaah dokumen- dokumen yang terdapat pada kantor Pemerintah Kabupaten Takalar. Seperti dokumen laporan keuangan di kantor BPKD di antaranya.
 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 3. Neraca
 4. Laporan Operasional

5. Laporan Aus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

2. Penelitian Kepustakaan (library Reseach)

Penelitian di lakukan melalui Study Kepustakaan atau Study Literature dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literature berupa buku- buku peraturan perundang- undangan, artikel, situs web. Study kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin terori yang di harapkan akan dapat menunjang data yang di kumpulkan dan pengelolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini. Seperti PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP.

E. Jenis Data, Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan Sumber data yang di gunakan peneliti dalam penelitian mengenai “ Penerapan Standar Akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Takalar “ adalah data primer Menurut sugiyono (2009:225) data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan adalah Analisis Deskriptif . Analisis Deskriptif yaitu metode yang di lakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga di peroleh gambaran yang

cukup jelas tentang penyajian laporan keuangan Kabupaten Takalar Tahun 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Kabupaten Takalar dengan ibu kota Pattalassang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km², di mana 240,88 km² di antaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. Dengan batas wilayah, bagian utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, bagian selatan dibatasi oleh laut Flores, bagian barat dibatasi oleh Selat Makassar, Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 kecamatan.

a. Visi Dan Misi Kabuapten Takalar

1. Visi

Visi Kabupaten Takalar priode tahun 2013 sampai 2017 yaitu “ Takalar Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, Beriman Dan Bertakwa ”

2. Misi

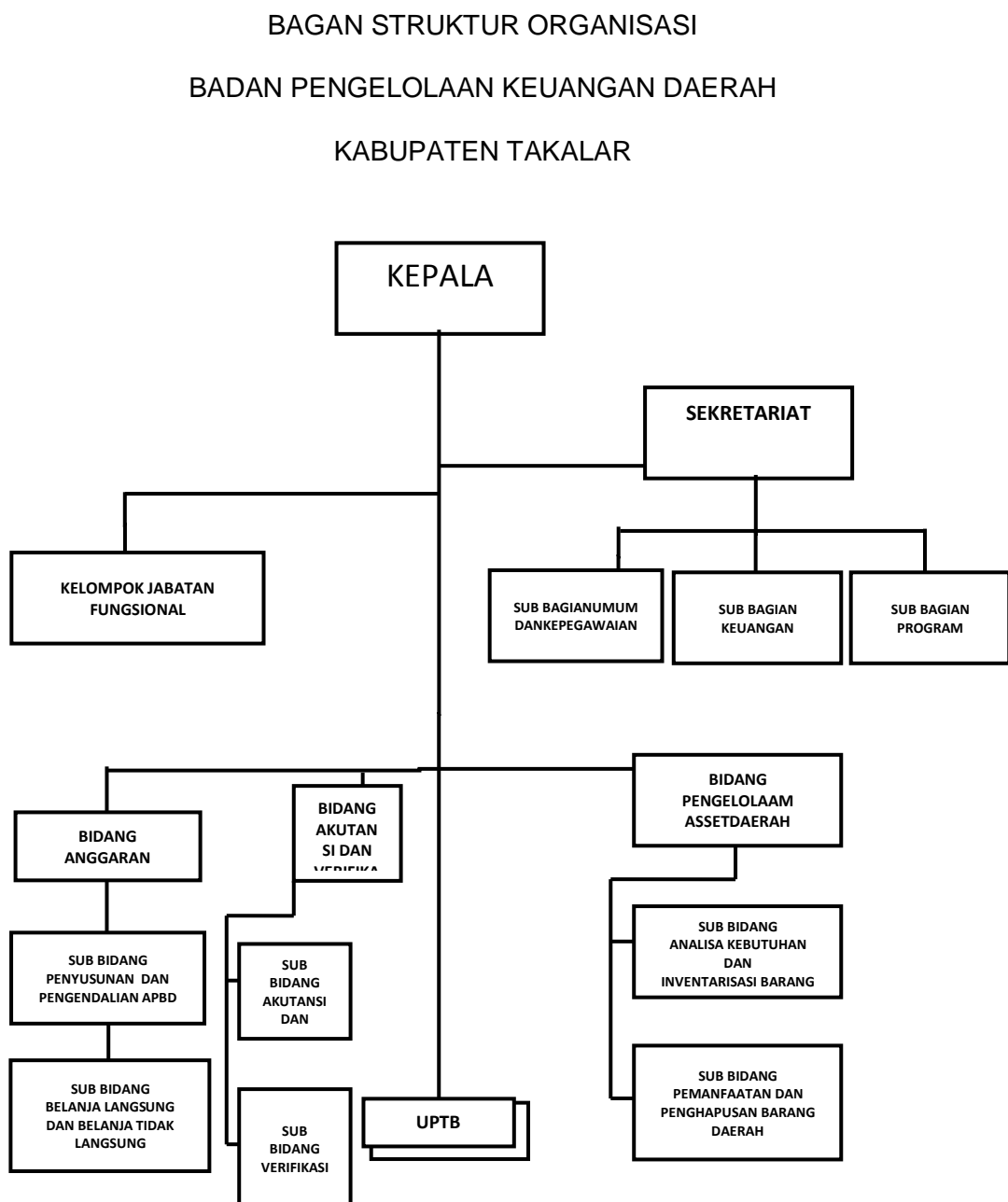
1. Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan pengendalian pengeloaln keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah

4. Memaksimalkan pendapatan daerah melalui dana transfer dan bantuan keuangan
5. Memaksiamalkan pengelolaan aset daerah.

b. struktur organisasi dan job description

1. Struktur Organisasi

Gambar. 2.2



2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No. 21 tahun 2014 tentang tugas dan fungsi jabatan struktural, maka uraian tugas masing – masing jabatan dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatalaksanaan Dinas yang meliputi: surat-menyurat, kearsipan, pengandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah tangga, serta urusan administrasi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan.

- c. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pelaksanaan urusan data dan informasi, penyusunan rencana kerja dan monitoring, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.
3. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang anggaran.
- a. Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian APBD
Kepala Seksi Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dan Pengendalian APBD.
 - b. Kepala Sub Bidang Otorisasi Dokemen Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang otorisasi dokumen Anggaran Kepala Bidang Akuntansi dan Belanja.
4. Kepala Bidang Akuntansi dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan daerah di dibidang Akuntansi dan Belanja.
- a. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas realisasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta menyiapkan laporan keuangan.
 - b. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung
Kepala Seksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung mempunyai tugas melakukan pembinaan,

perencanaan, monitoring dan evaluasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penghapusan, pelangan, inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan pengendalian/ pengawasan pengelolaan asset serta pembinaan administrasi barang dan pengelolaan investasi baik dalam bentuk uang maupun aktiva lainnya serta kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan dan pengelolaan asset.
 - a. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang mempunyai tugas melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi ,penilaian, pengawasan, analisa kebutuhan dan inventarisasi barang.
 - b. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang mempunyai tugas melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan pemanfaatan dan penghapusan barang-barang.

B. HASIL PENELITIAN

Kehadiran peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud

dengan SAP berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Berikun catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan keaungan pemerintah Kabupaten Takalar

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Takalar menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit -LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran paling kurang mencakup Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) dan Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat.

Tabel. 2.2
Laporan Realisasi Anggran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Takalar.

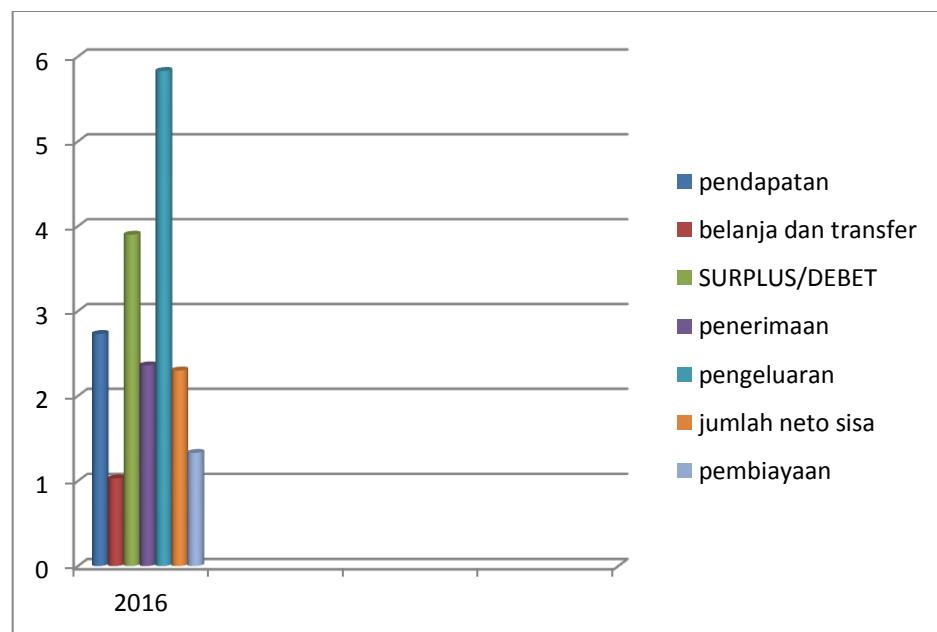
No	Uraian	2016	2015
1.	Pendapatan	1.180.322.264.316,93	1.014.889.316.268,26
2.	Belanja dan Tranfer	1.293.411.312.395,00	964.299.330.813,50
3	SURPLUS/ DEBIT	(113.089.048.078,07)	50.589.985.454,76
4	Penerimaan	165.728.727.971,64	117.138.742.516,88

5	Pengeluaran	2.583.033.000,00	2.000.000.000,00
6	Jumlah netto Sisa lebih	163.145.694.971,64	115.138.742.516,88
7	pembiayaan	50.056.646.893,57	165.728.727.971,64

Data di olah : Realisasi anggaran di tahun 2016 yang telah di anggarkan mengalami penurunan di bandingkan di tahun 2015 ini di akibatkan karena Transfer dari pemerintah pusat di kurangi.

Diagram 2.3

Gambaran kenaikan atau penurunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Takalar.



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Takalar menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL

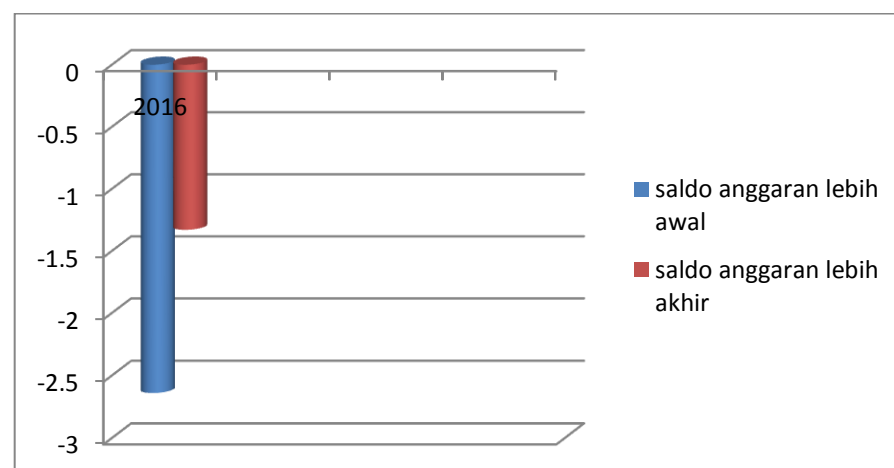
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Tabel. 2.3
Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih

No	Uraian	2015	2016
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	117.141.189.348,88	65.728.727.971,64
2.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	165.728727.971,64	50.056.646.893,57

Diagram 2.4

Gambaran kenaikan dan penurunan laporan saldo anggaran lebih Kabupaten Takalar



3. Neraca

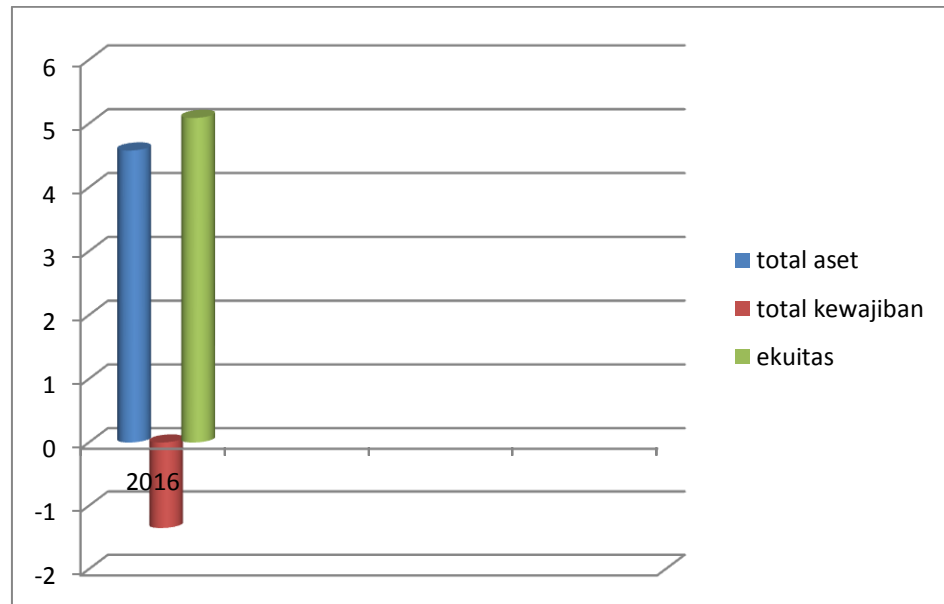
Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Takalar menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya, Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, piutang dari kegiatan, persediaan, Investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

Tabel. 2.4
Laporan Neraca

No	Uraian	2015	2016
1.	Total Aset	1.269.949.649.049,98	1.484.003.523.312,24
2.	Total Kewajiban	38.988.500.433,87	27.331.091.617,00
3.	Ekuitas	1.230.949.649.049,98	1.456.672.431.695,24

Data di olah : Jumlah aset mengalami kenaikan di tahun 2016 dikarenakan adanya pembelian, pengadaan, hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, begitu pula kewajiban di tahun 2015 mengalami kenaikan di bandingkan di tahun 2016 ini menunjukkan pekerjaan di tahun 2015 masih banyak yang tidak di bayarkan di bandingkan di tahun 2016 yang menunjukkan adanya penurunan kewajiban.

Diagram 2.5
Gambaran kenaikan dan penurunan neraca Kabupaten Takalar



4. Laporan Operasional

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Kegiatan nonoperasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO.

Tabel. 2.5
Laporan Operasional

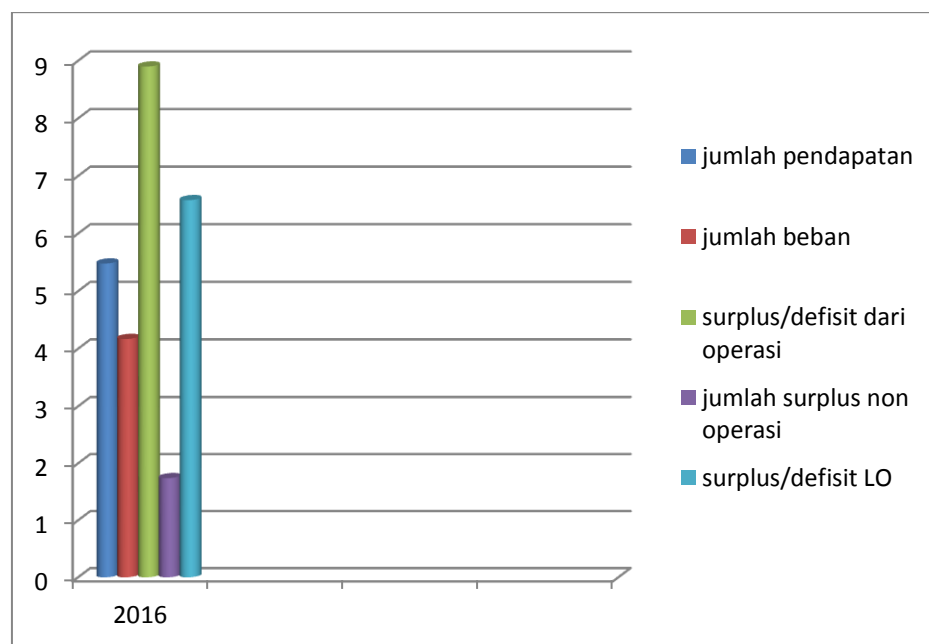
No	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah	1.017.104.379.717,26	1.251.306.089.658,60

	Pendapatan		
2.	Jumlah Beban	882.706.648.699,46	1.087.071.687.941,80
3.	Surplus/defisit dari Operasi	134.398.731.017,80	164.234.401.716,80
4.	Jumlah Surplus non operasional	1.814.869.689,11	5.989.913.839,06
5.	Surplus/Defisit LO	132.583.861.328,69	158.244.487.877,74

Data di olah : Pendapatan di tahun 2016 mengalami kenaikan di bandingkan di tahun 2015 ini di akibatkan karena pendapatan di tahun 2016 dari rencana perjanjian-perjanjian dari pihak hotel.

Diagram 2.6

Gambaran dan kenaikan dan penurunan laporan operasional
Kabupaten Takalar



5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Takalar menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

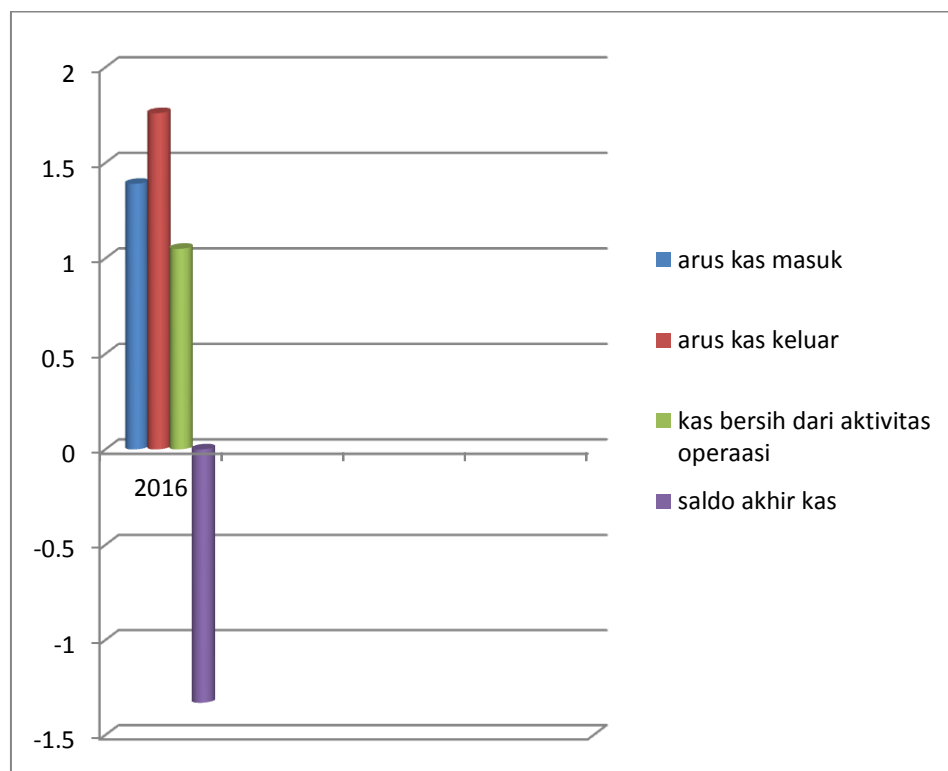
Tabel. 2.6
Laporan Arus Kas

No	Uraian	2015	2016
1.	Arus KasMasuk	014.889.316.269,26	1.180.074.936.030,93
2.	Arus Kas Keluar	753.293.773.650,50	886.008.847.847,00
3.	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	261.595.542.662,76	294.066.088.183,93
4.	Arus Kas Masuk	0,00	247.328.286,00
5.	Arus Kas Keluar	231.345.905.667,00	409.985.497.548,00
6.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(231.345.905.667,00)	(409.338.169.262,00)
7.	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
8.	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
9.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
10.	Arus Kas Masuk	73.530.761.898,86	159.907.429.437,62
11.	Arus Kas Keluar	255.394.874.165,36	159.999.453.165,67
12.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(181.864.114.270,50)	(92.023.728,00)
13.	Kenaikan dan Penurunan Kas	133.614.477.274,74	(115.764.104.806,07)
14.	Dana Bos	(16.620.422.218,86)	49.974.045.648,57

15.	Saldo Akhir Kas	165.738.150.454,64	50.055125.343,57
-----	-----------------	--------------------	------------------

Data di olah : yang membedakan kenaikan dan penurunan kas jumlah penerimaan dari aktivitas operasi dengan pengeluaran aktivitas operasi di tahun berjalan, kemudian adanya kas di bendahara penerima dan kas di bendahara pengeluaran belum tersetor di tahun sebelumnya mengakibatkan posisi arus kas saldo akhir kas, laporan arus kas itu yang membedakan tahun sebelumnya dengan tahun ini.

Diagram 2.7
Gambaran kenaikan dan penurunan laporan arus kas
Kabupaten Takalar



6. Laporan Perubahan Ekuitas

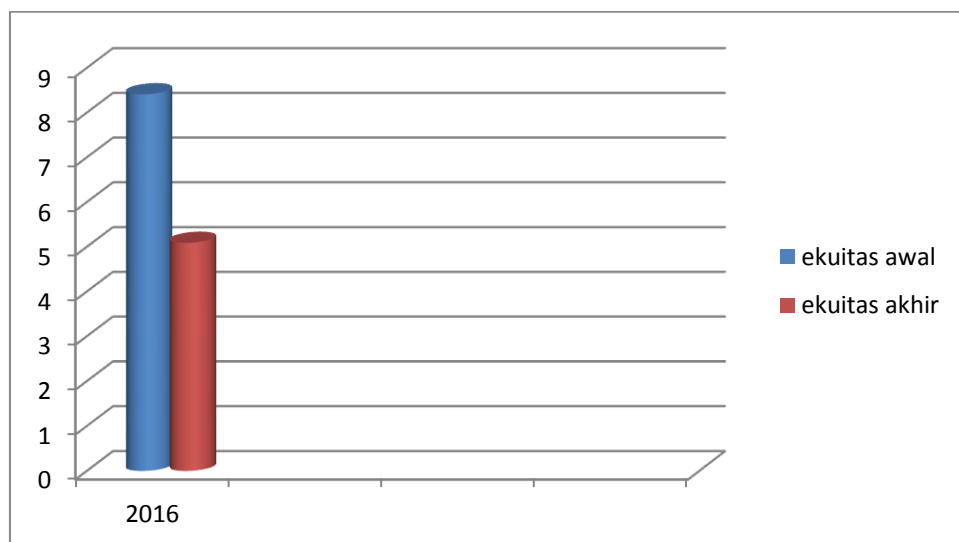
Laporan Pemerintah Kabupaten Takalar menggambarkan kenaikan dan penurunan ekuitas serta penyebab kenaikan dan penurunan ekuitas.

Tabel. 2.7
Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2015	2016
1.	Ekuitas awal	1.521.075.863.137,41	1.230.961.148.616,11
2.	Ekuitas akhir	1.230.961.148.616,11	1.456.672.431.695,24

Data di olah : Berdampak kenaikanya karena adanya koreksi penyisihan investasi, adanya koreksi asset lama, koreksi asset tetap, penyelesaian utang belanja, koreksi piutang yang menyebabkan dampak – dampak kumulatif adanya kesalahan yang mendasar di ekuitas serta peningkatan tambang pasir yang ada di kecamatan galesong utara Kabupaten Takalar

Diagram 2.8
Gambaran kenaikan dan penurunan laporan perubahan ekuitas Kabupaten Takalar



- b. 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang sudah sesuai dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar di lihat dari hasil Laporan Keuangan.

Tabel 2.8
12 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

No	PSAP	Pemerintah Kab. Takalar	Sesuai	Tidak sesuai
1.	PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan Tanggung jawab penyusunan dan penyaji laporan keuangan pada pimpinan entitas. Komponen-komponen laporan keuangan, Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan.	Laporan keuangan Kabupaten Takalar sudah sesuai PSAP No. 01 yang mempunyai 7 komponen laporan keuangannya terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan keuangan (merupakan bagian yang tidak terpisah dari keenam laporan keuangan),	✓	
2.	PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing masing di perbandingkan dengan anggarannya	Dari PSAP No. 02 yang membahas tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Takalar sudah sesuai berdasarkan hasil laporan keuangan yang di dapat di Kabupaten Takalar yang menyajikan mengenai Realisasi Anggaran-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan	✓	
3.	PSAP No. 03 Laporan Arus Kas Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengguna, penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelapor. ini di sajikan untuk memperta	Dengan PSAP No. 03 yang membahas tentang Laporan Arus Kas pada pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 03 dimana tujuan dari Laporan Arus Kas yaitu untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas sesuai laporan keuangan Kabupaten Takalar.	✓	

	nggungjawabkan dan pengambilan keputusan			
4.	<p>PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan</p> <p>Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan dan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas</p>	<p>Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 04 yang membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan meskipun dalam laporan keuangan Kabupaten Takalar tidak terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan akan tetapi Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Takalar merupakan bagian yang tidak terpisah dari ke enam (6) laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi, Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas</p>	✓	
5.	<p>PSAP No.05 Akuntansi Persediaan</p> <p>Pengakuan Persediaan di akui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat di terima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah</p>	<p>Akuntansi Persediaan Pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 05 yang membahas tentang Akuntansi Persediaan di mana koreksi nilai persediaan sebesar Rp. (81.911.500,00) di tahun 2016</p>	✓	
6.	<p>PSAP No. 06 Akuntansi Investasi</p> <p>Klasifikasi investasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Investasi jangka pendek Investasi jangka panjang di bagi menurut sifatnya Penanaman investasinya yaitu permanen dan non permanen 	<p>Akuntansi Investasi pada Pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 06 yang membahas tentang Akuntansi Investasi dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, di mana dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam investasi jangka panjang yang di bagi menurut sifatnya yaitu yang termasuk investasi yaitu dana bergulir sedangkan investasi permanen yaitu penyertaan modal pemerintah daerah sesuai pada Laporan Keuangan</p>	✓	

		gan Pemerintah Kabupaten Takalar		
7.	PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap Aset tetap Di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas	Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP 07 yang membahas tentang Akuntansi Aset Tetap yang di klasifikasikan menurut sifatnya sesuai isi atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar.	✓	
8.	PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dan Pengerjaan Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus di akui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika : a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut yang akan di peroleh. b. Biaya perolehan tersebut dapat di ukur secara andal c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan	Dalam PSAP No. 08 yang membahas tentang Akuntansi Konstruksi dan Pengerjaan sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Kabupaten Takalar di lihat segi dari tempat wisata Kabupaten Takalar, yang dari tahun 2016 sampai sekarang terus di Adakan pengerjaan agar lebih meningkatkan keindahan supaya Pengunjung semakin nyaman dan aman dan pendapatan Kabupaten Takalar semakin meningkat dari tahun ke tahun	✓	
9.	PSAP No.09 Akuntansi Kewajiban Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika di harapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan	Dalam PSAP No. 09 yang membahas tentang akuntansi kewajiban di mana PSAP No. 09 sudah sesuai dengan laporan keuangan Kabupaten Takalar, yang terbagi dalam utang jangka panjang dan utang jangka pendek, utang jangka panjang termasuk utang dalam negeri-obligasi dan utang jangka pendek termasuk utang bunga, utang belanja, pendapatan di terima di muka.	✓	
10.	PSAP No. 10 Korelasi	Dalam PSAP No. 10 yang	✓	

	<p>Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa</p> <p>Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut</p>	<p>membahas tentang Korelasi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa sudah sesuai Laporan Keuangan Kabupaten Takalar dimana Jumlah aset mengalami kenaikan di tahun 2016 dikarenakan adanya pembelian, pengadaan, hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, begitu pula kewajiban di tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan di tahun 2016 ini menunjukkan pekerjaan di tahun 2015 masih banyak yang tidak di bayarkan dibandingkan di tahun 2016 yang menunjukkan adanya penurunan kewajiban</p>		
11.	<p>PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi.</p> <p>Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.</p>	<p>Dalam PSAP No. 11 yang membahas tentang Laporan Keuangan Konsolidasi sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan meskipun Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan lainnya</p>	✓	
12.	<p>PSAP No. 12 Laporan Operasional</p> <p>Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.</p>	<p>Dalam PSAP No. 12 yang membahas tentang Laporan Operasional sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Kabupaten Takalar yang menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonperasi serta pos luar biasa</p>	✓	

Berdasarkan perbandingan dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan 12 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berarti laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sudah biasa di katakan berkualitas.

C. PEMBAHASAN

Proses akuntansi keuangan daerah pada umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongandan tahap pelaporan. Begitu pula dengan laporan keuangan yang di hasilkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Sudah berdasarkan laporan keuangan yang berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas berbuah menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan salah satu informan yaitu Bapak Kamaruddin,S.Sos selaku staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, Ketika di tanya peraturan pemerintah yang di pakai pada saat ini, Bapak Kamaruddin S.Sos mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah yang di pakai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang secara penuh mulai di terapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar pada tahun 2015,kemudian di tanya kembali sebelum adanya PP Nomor 71 tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Takalar menggunakan Peraturan Pemerintah, dan apa perbedaan dari PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 Bapak menjawab kembali Peraturan Pemerintah yang di pakai sebelum adanya PP Nomor

71 Tahun 2010 yaitu PP Nomor 24 tahun 2005 Dimana kedua perbedaannya yaitu, kalau PP Nomor 24 Tahun 2005 Yaitu tidak mencantumkan nilai piutang, kas penerimaan ataupun pengeluaran nanti di akui ketika uang di terima ataupun di dikeluarkan sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2010 di mana kas penerimaan dan pengeluaran di akui ketika pada saat perencanaan sudah di akui dan sudah di catat sebagai perencanaan.

Aparatur pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Takalar ketika ditanyakan mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah tahu akan definisi dari basis akrual itu sendiri, suatu basis dimana transaksi ekonomi dan transaksi lainnya dicatat, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan. Kemudian PP 71 Tahun 2010 sudah jelas begitu di rencanakan sudah di catat sebagai perencanaan pada saat perencanaan sudah diakui. Kemudian di tanya kembali kelebihan dari PP Nomor 71 Tahun 2010, bapak menjawab kelebihan dari PP 71 Tahun 2010 sudah di jelaskan berapa yang mau di terima sesuai dengan ikatan kontraknya, di bandingkan dengan PP 24 Tahun 2005 di mana tidak jelas rencana yang mau di terima. Ketika di tanya kembali pengaruh PP 71 Tahun 2010 terhadap kualitas Laporan keuangan mereka menjawab bahwa setelah PP 71 Tahun 2010 lebih transparan dan berkualitas yang menghasilkan 7 laporan keuangan diantaranya

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional

5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan).

di bandingkan dengan PP 24 Tahun 2005 yang tidak transparan yang hanya menghasilkan 3 laporan keuangan yaitu.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Mencermati seputar penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang diharuskan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PP 71 Tahun 2010 bagi daerah ini mungkin merupakan produk baru, tapi kalau kami lihat, Kabupaten Takalar sudah sepenuhnya menerapkan peraturan ini mengingat standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan produk baru, namun sangatlah jelas bahwa baik Kamaruddin S.os maupun para pengelola keuangan lain di pemerintahan Kabupaten Takalar sangat optimis dengan keberhasilan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini. Pemerintah Kabupaten Takalar terkesan hanya menjalankan kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dengan melakukan persiapan-persiapan seperti sosialisasi serta pelatihan untuk semua entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintahan Kabupaten Takalar serta penyiapan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedurnya. Dengan demikian, persiapan strategi tersebut yang dilakukan dalam rangka

implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Takalar berjalan sesuai dengan pentahapan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah versi KSAP.

Saat ditanyakan mengenai pelatihan tentang PP No.71 tahun 2010, Bapak menjawab pernah dilakukan bahkan diantara mereka ada yang sudah lebih dari dua kali mengikuti pelatihan tersebut. Kamaruddin S.SOs mengungkapkan bahwa saya sudah mengikuti pelatihan ini lebih dari dua kali, dan saya cukup mengerti terkait hal ini dan beliau cukup memahami PP No.71 Tahun 2010 tersebut. Menyangkut dengan sosialisasi PP No.71 Tahun 2010, Bapak menuturkan sudah pernah dilakukan oleh pemerintah lebih dari satu kali dan Bapak mengatakan sudah ada alokasi SDM yang dipersiapkan khusus untuk pembuatan laporan keuangan berbasis akrual ini. Ketika ditanyakan apakah peraturan ini harus dilaksanakan, Kamaruddin S, Sos mengungkapkan: Ya, dengan alasan karena peraturan ini sudah menjadi keputusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sudah menjadi pembahasan baik oleh BPK, Menkeu, Menhukham, yang tujuannya untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola. Selanjutnya di tanya kembali : Harus, selain hal ini sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk dilaksanakan, juga memudahkan Pemda untuk mengetahui seberapa besar sumberdaya ekonomi dan beban yang harus ditanggung dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Secara pribadi, karena kebetulan kerja dalam instansi pemerintahan, maka pastinya kita

ikuti perubahan yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak apa-apa juga selama perubahan itu untuk kebaikan dan selama perubahan itu bagus.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Takalar dalam persiapan menuju standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah melakukan langkah-langkah strategis berupa pemberian sosialisasi atau pelatihan kepada para pegawai, menyiapkan software yang menunjang implementasi serta membuat peraturan daerah. Sosialisasi atau pelatihan diberikan dengan maksud untuk memberi pemahaman yang lebih luas kepada pihak-pihak pengelola keuangan pemerintahan Kabupaten Takalar dalam hal ini SKPD-SKPD Kabupaten tentang basis akrual. Pada saat ditanya Aplikasi apa yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual, Bapak menjawab, Aplikasi yang digunakan pada BPKD Kabupaten Takalar dalam menyusun laporan keuangan yaitu aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang berbasis akuntansi. Kemudian kembali ditanya apa pendapat BPK ketika di audit lalu bapak menjawab pendapat dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) ketika di audit memberikan opini wajar dengan pengecualian karena disebabkan masih terdapat salah penyajian dari segi pelaporan selalu ada yang di kecualikan terutama aset yang belum tuntas.

Walaupun secara nyata, jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan namun, bagi para pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Takalar, kompleksitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh PP 71

Tahun 2010 semakin nampak dengan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran) dengan pelaporan finansial (akuntansi keuangan).

Pemisahan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi anggaran ini disebut dengan *extra countable* atau pencatatan terpisah antara akuntansi dengan anggaran. Dengan demikian, hal ini pastinya memerlukan analisa yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan ini kalau dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Friska Langelo (2015) meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung berbeda dengan hasil penelitian yang didapat di Kabupaten Takalar terutama dalam penerapan basis akrual sistem yang diterapkan di Kota Bitung tersebut masih menggunakan basis kas. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! yang di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tersebut terdiri dari kerangka konseptual dan 12 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu :

- PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- PSAP 03 tentang Laporan Aus Kas
- PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

- PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- PSAP 07 tentang Akuntansi Asset Tetap
- PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
- PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak di lanjutkan
- PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAP 12 tentang Laporan Operasional

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

PSAP No 01 Penyajian Laporan Keuangan membahas tentang,

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peran prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang di butuhkan untuk operasi berkelanjutan.

2. Tanggung Jawab Pelapor Keuangan

Tanggung jawab penyusun dan penyaji laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

1. Komponen- komponen laporan keuangan

a. Laporan realisasi anggaran

- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan operasional
 - e. Laporan arus kas
 - f. Laporan perubahan ekuitas
 - g. Catatan atas laporan keuangan
2. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan di identifikasikan dan di bedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitnya yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang di sajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.

Laporan keuangan di sajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan dalam suatu entitas berbuah dan laporan keuangan tahunan di sajikan dengan suatu periode lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelapor mengungkapkan informasi berikut :

- a. Alasan penggunaan periode pelapor tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat di perbandingkan.

Dari pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 01 dimana identifikasi laporan keuangan Kabupaten Takalar

disajikan sekali dalam setahun sebagai mana data yang di dapat pada tahun 2015 dan tahun 2016 kemudian tujuan umum laporan keuangan Kabupaten Takalar yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna, begitupun tanggung jawab pelapor keuangan di mana laporan keuangan Kabupaten Takalar sudah sesuai PSAP No. 01 yang mempunyai 7 komponen laporan keuangannya terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan keuangan (merupakan bagian yang tidak terpisah dari ke enam laporan keuangan),

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran membahas tentang,

1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelapor yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelapor terhadap anggaran serta menyediakan informasi

mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran.

2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto
- h. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Dari PSAP No. 02 yang membahas tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Takalar sudah sesuai berdasarkan hasil laporan keuangan yang di dapat di Kabupaten Takalar yang menyajikan mengenai Realisasi Anggaran-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

PSAP NO. 03 membahas tentang tujuan Laporan Arus Kas dan klasifikasi laporan arus kas.

1. Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengguna, penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelapor. ini di sajikan untuk mempertanggungjawabkan dan

pengambilan keputusan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang klasifikasinya berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitiro.

2. Klasifikasi Arus Kas

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut dapat di gunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transistori. Laporan arus kas di klasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistori berikut:

- a. Aktivitas operasi di peroleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya.
- b. Aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari investasi dalam bentuk sekuritas.
- c. Aktivitas pendanaan antara lain penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari uantng obligasi, penerimaan kembali pinjaman dari pemerintah daerah, penerimaan kembali kepada perusahaan daerah.

- d. Aktivitas transitori adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Dengan PSAP No. 03 yang membahas tentang Laporan Arus Kas pada pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 03 dimana tujuan dari Laporan Arus Kas yaitu untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas sesuai laporan keuangan Kabupaten Takalar.

4. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan membahas tentang,

1. Struktur dan Isi

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan dan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas

2. Penyajian Informasi tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Seperti domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasinya.

3. Penyajian Informasi tentang Fiskal dan Ekonomi Makro

Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi keuangan makro

4. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode tertentu di bandingkan dengan anggaran yang pertama kali di setujui oleh DPR/DPRD , hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang di tetapkan, serta masalah lainnya yang di anggap perlu di manajemen entitas pelaporan untuk di ketahui pembaca laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 04 yang membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan meskipun dalam laporan keuangan Kabupaten Takalar tidak terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan akan tetapi Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Takalar merupakan bagian yang tidak terpisah dari ke enam (6) laporan keuangan yaitu

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan membahas tentang,

1. Pengakuan

Persediaan di akui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur dengan andal, pada saat di terima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

2. Pengukuran

Persediaan di sajikan sebesar biaya perolehan apabila di peroleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila di peroleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar, apabila di peroleh dengan cara donasi/rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat di bebaskan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang secara langsung dapat di bebaskan pada perolehan persediaan. Persediaan dapat di nilai dengan menggambarkan

- a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenisnya.

Akuntansi Persediaan Pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 05 yang membahas tentang Akuntansi Persediaan di mana koreksi nilai persediaan sebesar Rp. (81.911.500,00) di tahun 2016

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

PSAP No. 06 Akuntansi Investasi membahas tentang,

1. Klasifikasi investasi

Investasi pemerintah di klasifikasikan menjadi dua yaitu

a. Investasi jangka pendek

Investasi yang di golongan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari : deposito berjangka waktu tiga sampai tiga belas bulan yang dapat di perpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pembelian sertifikat bank indonesia.

b. Investasi jangka panjang di bagi menurut sifatnya

Penanaman investasinya yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah invesatsi jangka panjang yang di maksudkan untuk di miliki secara berkelanjutan contoh, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah , sedangkan investasi nonpermanen adalah invesatasi jangka panjang yang di maksudkan untuk di miliki secara tidak berkelanjutan contoh, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang.

2. Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas dan aset pemerintah hibah dalam bentuk invesatsi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat di akui secara investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan mafaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi dapat di peroleh pemerintah

3. Pengukuran Investasi

Terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar di pergunakan sebagai dasar

penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif di pergunakan nilai nominal nilai tercatat atau nilai lainnya.

Akuntansi Investasi pada Pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP No. 06 yang membahas tentang Akuntansi Invetasi dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, di mana dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam investasi jangka panjang yang di bagi menurut sifatnya yaitu yang termasuk investasi nonpermanen yaitu dana bergulir sedangkan investasi permanen yaitu penyertaan modal pemerintah daerah sesuai pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap membahas tentang,

1. Klasifikasi aset tetap

Di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

2. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap di akui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat di peroleh dan nilainya dapat di ukur dengan andal berdasarkan kriteria yaitu : berwujud, mempunyai masa manfaat lebih.

3. Pengukuran Aset Tetap

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan PSAP 07 yang membahas tentang Akuntansi Aset Tetap yang di klasifikasikan menurut sifatnya sesuai isi atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar.

8. **PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dan Pengerjaan**

PSAP No. 09 Akuntansi Kontruksi dan Pengerjaan membahas tentang

1. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus di akui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika :

- d. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut yang akan di peroleh.
- e. Biaya perolehan tersebut dapat di ukur secara andal,
- f. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

2. Pengukuran Konstruksi dalam pekerjaan

Nilai konstruksi di kerjakan dengan Swakelola:

- 1. biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi;
- 2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
- 3. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi.

3. Pengungkapan konstruksi Dalam Pekerjaan

Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:

- 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3. Asset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Dalam PSAP No. 08 yang membahas tentang Akuntansi Konstruksi dan Pengerjaan sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Kabupaten Takalar di lihat segi pendapatan dari tempat wisata Kabupaten Takalar, yang dari tahun 2016 sampai sekarang terus di Adakan pengerjaan agar lebih meningkatkan keindahan supaya Pengunjung semakin nyaman dan aman dan pendapatan Kabupaten Takalar semakin meningkat dari tahun ke tahun

9. PSAP No.09 Akuntansi Kewajiban

PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban membahas tentang,

1. Klasifikasi kewajiban

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

2. pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

1. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
2. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);
4. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

3. Pengukuran kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral

pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

Dalam PSAP No. 09 yang membahas tentang akuntansi kewajiban di mana PSAP No. 09 sudah sesuai dengan laporan keuangan Kabupaten Takalar, yang terbagi dalam utang jangka panjang dan utang jangka pendek, utang jangka panjang termasuk utang dalam negeri-obligasi dan utang jangka pendek termasuk utang bunga, utang belanja, pendapatan di terima di muka.

10. **PSAP No. 10 Korelasi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa**

PSAP No. 10 Korelasi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa membahas tentang,

1. Koreksi kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan

aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas..

3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan –misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada– harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam PSAP No. 10 yang membahas tentang Korelasi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa sudah sesuai Laporan Keuangan Kabupaten Takalar dimana Jumlah aset mengalami kenaikan di tahun 2016 di karenakan adanya pembelian, pengadaan, hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, begitu pula

kewajiban di tahun 2015 mengalami kenaikan di bandingkan di tahun 2016 ini menunjukkan pekerjaan di tahun 2015 masih banyak yang tidak di bayarkan di bandingkan di tahun 2016 yang menunjukkan adanya penurunan kewajiban.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi.

PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi membahas tentang,

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 7, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam PSAP No. 11 yang membahas tentang Laporan Keuangan Konsolidasi sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan meskipun Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan lainnya.

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

PSAP No. 12 Laporan Operasional membahas tentang,

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut: alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur: pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LsO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan

Dalam PSAP No. 12 yang membahas tentang Laporan Operasional sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Kabupaten Takalar yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasi serta pos luar biasa

Terdapat empat karakter pokok sehingga laporan keuangan bisa di katakan berkualitas yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Penjelasan detil dari empat karakter kualitatif pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pertama: Dapat Dipahami

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah di pahami oleh pembaca begitu pula laporan keuangan juga harus di sajikan dengan baik dan sesuai standar agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut.

2 Kualitas Kedua: Relevan

Informasi di katakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam proses pengambilan keputusan yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini atau masa depan

3 Kualitas Ketiga: Keandalan

Informasi di katakan andal apabila Tidak memiliki atau bebas dari bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation).

4 Kualitas Keempat: Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif

Sesuai dengan hipotesis yang penulis ajukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kab. Takalar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 , terjawab

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikan peran pemerintah dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Takalar yang sudah sepenuhnya menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang berbasis akrual sejak tahun 2015. Yang menyatakan bahwa dengan adanya penerapan SAP berbasis akrual memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan serta lebih transparan dan berkualitas karena sebelum adanya PP 71 Tahun 2010 seluruh pendapatan aset, dan utang di akui ketika kas masuk atau di bayarkan di bandingkan dengan PP 71 Tahun 2010 di mana seluruh aset, pendapatan dan utang di akui pada saat perencanaan terjadi tanpa memperhatikan kas masuk atau di bayarkan

B. SARAN

Saran atau rekomendasi yang diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini, dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di tahun 2015, khususnya pada pemerintah Kabupaten Takalar yaitu lebih berupaya meningkatkan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual, meskipun sudah sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual di mana pendapat dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberi opini wajar dengan pengecualiaan karena dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat kesalahan terutama asset yang belum tuntas

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga Yogyakarta
- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPF. Yogyakarta
- Heri, 2013. *Teori Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardasmo, P. D. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Triaswati, H dan Wasisto, H. 2005. *Akuntansi Internasional*. BPF. Yogyakarta
- Tanjung, A. H. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Untuk SKPD*. Alfabeta. Bandung.
- Inapty, A. F. B. A. RR., dan Martiningsi. S. P. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Keuangan*. Jurnal Ilmu Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 9 (1).
- Jaladri, E. Q. dan Riharjo, I.B. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, STIESIA Surabaya. Volume 5, Nomor 11.
- Kema, I. 2013. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado*. Jurnal Emba, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3.
- Langelo, F. dan Saerang, D. P. F. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal Emba, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.3 No.1.
- Lalombombuid, S dan Tinangon, J. 2014. *Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Emba, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.2 No.1.

- Lamonisi, S. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal Emba, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4 No.1.
- Mentu, E. P. dan Sondakh, J. J. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Jurnal Emba, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.4 No.1.
- Niu, F. A. L. Dan Karamoy, H. 2014. *Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal Emba, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.2 No.4.
- Suhardjo, Y. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Stir Semarang, Universitas Semarang. Vol 5, No. 3.
- Zeyn, E. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Jurnal ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung. Volume 10, No. 1.

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
METODE LANGSUNG

No	Uraian	Reff	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas	7.5.5.1		
2	Arus Kas dari Aktivitas Operas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.a		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		10.426.482.744,50	9.466.053.249,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan		8.802.727.508,00	6.134.299.759,00
6	Penerimaan Lain –Lain PAD Yang Sah		8.958.319.418,00	7.325.646.739,56
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		67.191.088.558,63	51.901.932.723,76
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		15.479.528.043,00	7.788.205.400,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		7.524.863.561,00	7.546.004.784,00
10	Penarimaan Dana Alokasi Khusus		597.985.638.000,00	554.136.141.000,00
11	Penarimaan Dana Penyusaian		315.075.996.933,00	175.822.130.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		84.824.326.000,00	142.866.885.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		53.050.192.264,80	36.483.886.212,94
14	Penerimaan Hibah		0,00	14.571.538.400,00
15	Penerimaan Dana Darurat		10.755.773.000,00	846.593.000,00
16	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
17	Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
			1.180.074.936.030,93	1.014.889.316.268,26
18	Arus Kas Keluar	7.5.5.1.b		
19	Pembayaran Pegawai		574.280.008.073,00	465.248.874.340,00
20	Pembayaran Barang		217.347.450.174,00	252.328.278.656,50
21	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
22	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
23	Pembayaran Hibah		27.423.883.300,00	2.750.000.000,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	1.000.000.000,00
25	Pembayaran Tak Terduga		0,00	0,00
26	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemda Lainnya		0,00	0,00
27	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		66.535.254.000,00	31.246.889.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
32	Pembayaran Biaya Pungutan Pajak		0,00	340.348.459,00
33	Pembayaran Bantuan Kepada Partai Politik		422.252.300,00	379.383.150,00
34	Pengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran Yang Belum Di Pertanggungjawabkan			0,00

35	Jumlah Arus Keluar Kas		886.008.847.847,00	753.293.773.650,50
36	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		294.066.088.183,93	261.595.542.662,76
37	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas	7.5.5.2		
38	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.a		
39	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
40	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
41	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
42	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		247.328.286,00	0,00
43	Penjualan atas Jalan,Irigasi dan Bangunan		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan		0,00	0,00
47	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		247.328.286,00	0,00
48	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.b		
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Perolehan Tanah		908.280.000,00	638.436.640,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		55.630.314.253,00	39.993.774.490,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		71.149.192.642,00	57.779.379.842,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Bangunan		278.668.971.653,00	112.207.521.695,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		211.090.000,00	687.393.000,00
55	Perolehan Aset Lainnya		834.616.000,00	39.400.000,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.583.033.000,00	2.000.000.000,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		409.985.497.548,00	213.345.905.667,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(409.738.169.262,00)	(213.345.905.667,00)
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3		
60	Arus Masuk Kas	7.5.5.3.a		
61	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri- lainnya		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
69	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.b		
70	Pemabayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		0,00	0,00

71	Pemabayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Pemabayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
73	Pemabayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
74	Pemabayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
75	Pemabayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Linnya		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
80	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran			
81	Arus Masuk Kas	7.5.5.4		
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		159.907.429.437,67	70.825.560.489,36
83	Penerimaan Kembali Kas Bendahara			
	Pengeluaran		0,00	2.705.201.409,50
	Jumlah Arus Kas Masuk		159.907.429.437,67	73.530.761.898,86
84	Arus Kas Keluar			
85	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		159.902.565.017,67	70.825.560.489,36
86	Pembrian Kas Kepada Bendahara		96.888.148,00	184.569.315.680,00
	Pengeluaran			
	Jumlah Arus Keluar Kas		159.999.453.165,67	255.394.876.169,36
				-
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(92.023.728,00)	(181.864.114.270,50)
88	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	(115.764.104.806,07)	(133.614.477.274,74)
89	Saldo Awal Kas di BUD	7.5.5.6	165.738.150.454,64	116.994.055.055,88
90	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	7.5.5.7	49.974.045.648,57	(16.620.422.218,86)
91	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		0,00	163.426.863.373,64
92	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.578.410.101,00
93	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
94	Saldo Akhir Kas JKN		0,00	259.436.941,00
95	Saldi di BLUD		0,00	473.440.039,00
96	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya- Dana BOS		31.083.695,00	0,00
97	Saldo Akhir Kas	7.5.5.8	50.005.129.343,57	165.738.150.454,64



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

N o	Uraian	Reff	2016	2015	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	7.5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.4.1.1				
3	Pendapatan pajak daerah	7.5.4.1.1.a	11.824.206.291,17	10.904.926.500,00	919.279.791,17	108,43
4	Pendapatan retribusi daerah	7.5.4.1.1.	9.212.320.088,00	6.319.346.759,00	2.892.973.249,00	145,78
5	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	b 7.5.4.1.1.c	8.958.319.418,00	7.325.646.739,56	1.632.672.678,44	122,29
6	Pendapaatan asli daerah lainnya	7.5.4.1.1.	70.448.893.918,63	50.196.034.509,76	20.252.859.408,87	140,35
7	Jumlah pendapatan asli daerah	d	100.443.739.635,80	74.745.954.508,32	25.697.785.127,48	134,38
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	7.5.4.1.2				s
10	Dana bagi hasil pajak	7.5.4.1.2.a	15.479.528.043,00	7.788.205.400,00	7.691.322.643,00	198,76
11	Dana bagi hasil SDA		7.524.863.581,00	7.546.004.784,00	(21.141.223,00)	99,72
12	Dana alokasi umum	a.1	597.985.838.000,00	554.136.141.000,00	43.849.497.000,00	107,91
13	Dana alokasi khusus	a.2	315.075.996.933,00	175.822.130.000,00	139.253.868.933,00	179,20
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	a.3 a.4	936.066.026.637,00	745.292.481.184,00	190.773.545.353,00	125,60
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
16	Dana otonomi khusus	7.5.4.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana penyusaian	b	84.824.326.000,00	120.824.213.000,00	(35.999.887.000,00)	70,20
18	Jumlah pendapatan transfer		84.824.326.000,00	120.824.213.000,00	(35.999.887.000,00)	70,20
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
20	Pendapata bagi hasil pajak		45.603.934.873,80	38.760.640.914,94	6.843.293.958,86	117,66
21	Pendapatan bagi hasil pajak lainnya	7.5.4.1.2.c	0,00	14.571.538.400,00	(14.571.538.400,00)	0,00
22	Pendapatan bantuan keuangan	C1	14.435.069.877,00	22.042.672.000,00	(7.607.602.123,00)	65,49
23	Jumlah transfer pemerintah	C2	60.039.044.750,80	76.374.851.314,94	(15.335.846.564,14)	79,66
24	Jumlah pendapaatan transfer		1.080.9229.357.287,80	941.491.545.498,94	139.437.811.788,86	114,81
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.4.1.3				
26	Pendapatan hibah	7.5.4.1.3.a	68.461.493.265,00	846.539.000,00	67.614.900.265,00	8.086,71
27	Pendapatan hibah aset		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendaptan dana darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan dana lainnya	7.5.4.1.3b	1.471.499.470,00	20.286.710,00	1.451.212.760,00	7.253,51
31	Jumlah lain pendapatan		69.932.992.735,00	866.879.710,00	69.066.113.025,00	8.067,21
32	JUMLAH PENDAPATAN		1.251.306.089.658,60	1.017.104.379.717,26	234.201.709.941,34	123,03

33	BEBAN	7.5.4.2					
34	Beban pegawai	7.5.4.2.1a	574.232.852.884,00	526.114.174.353,00	48.118.678.531,00	109,15	
35	Beban persediaan	7.5.4.2.1b	55.283.435.868,75	44.778.575.524,50	10.504.860.344,25	123,46	
36	Beban barang dan jasa	7.5.4.2.1c	174.566.284.489,25	120.576.279.555,00	53.990.004.934,25	144,78	
37	Beban pemeliharaan	7.5.4.2..d	13.227.449.565,00	6.062.444.036,00	7.165.005.529,00	218,19	
38	Beban perjalanan dinas	7.5.4.2.1e	28.788.723.745,00	21.830.289.796,00	6.958.433.949,00	131,88	
39	Beban bunga	7.5.4.2.1f	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Beban subsidi	7.5.4.2.1g	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Beban hibah	7.5.4.2..h	28.585.145.300,00	2.750.000.000,00	25.835.145.300,00	1.039,46	
42	Beban bantuan sosial	7.5.4.2.1i	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	0,00	
43	Beban penyusutan	7.5.4.2.1j	134.415.070.611,13	116.768.207.274,78	17.646.863.336,35	115,15	
44	Beban penyisihan piutang	7.5.4.2.1k	3.885.488.781,34	668.494.627,18	3.216.994.154,16	581,23	
45	Beban cadangan kerugian investasi non permanen	7.5.4.2.1l	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Beban transfer	7.5.4.2.2a	66.957.506.300,00	31.626.272.150,00	35.331.324.150,00	211,71	
47	Beban penghapusan aset	7.5.4.2.2b	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Beban hibah aset	7.5.4.2.2c	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Beban di bayar di muka	7.5.4.2..d	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Beban lain-lain	7.5.4.2.2e	7.129.730.397,33	10.530.911.383,00	(3.401.180.958,67)	67,70	
51	Beban dana BOS	7.5.4.2.2f	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	JUMLAH BEBAN		1.087.071.687.941,00	882.705.648.699,46	204.366.039.242,34	123,15	
53	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAASI		164.234.401.716,80	134.398.731.017,80	29.835.670.99,00	0,00	
54	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3					
55	Surplus penjualan aset non lancar		0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang		0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Defisit penjualan aset non lancar		0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang		0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Surplus/defisit dari kegiatan non operasioanl lainnya		(5.989.913.839,06)	(1.814.869.689,99)	(4.175.044.149,95)	330,05	
60	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(5.989.913.839,06)	(1.814.869.689,11)	(4.175.044.149,95)	330,05	
61	SURPLUS DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		158.244.487.877,74	132.583.861.328,69	25.660.626.549,05	119,35	
62	POS LUAR BIASA						
63	Pendapatan luar biasa		0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Beban luar biasa		0,00	0,00	0,00	0,00	
65	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00	
66	SURPLUS/DEFISIT-LO		158.244.487.877,74	132.583.861.328,69	25.660.626.549,05	119,35	



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

No	Uraian	Reff	2016	2015
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1	1.230.961.148.616,11	1.521.075.863.137,41
2	SURPLUS/DEVISIT-LO	7.5.6.2	158.244.487.877,74	132.583.861.328,69
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANKESALAHAN MENDASAR (3 =(SUM(4:3))	7.5.6.3	67.466.795.201,39	(422.698.575.849,99)
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	7.5.6.3.a	(81.911.500,00)	68.472.630,40
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	7.5.6.3.b	9.946.605,00	(5.528.406.960,78)
6	KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG	7.5.6.3.	0,00	890.686,95
7	KOREKSI NILAI UTANG BELANJA	7.5.6.3.d	(3.483.282.581,80)	5.893.590.030,00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	7.5.6.3.e	31.110.596.408,76	36.800.614.160,59
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	7.5.6.3.f	(1.934.442.784,00)	(2.208.566.145,50)
10	KOREKSI NILAI PENYISIHAN INVESTASI	7.5.6.3.g	50.400.000,00	(78.843.463,00)
11	KOREKSI NILAI PENYISIHAN ASET TETAP	7.5.6.3.h	(13.189.683.655,64)	(458.452.208.852,82)
12	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	7.5.6.3.i	19.558.066.849,00	0,00
13	LAIN –LAIN	7.5.6.3.j	35.427.105.860,07	805.882.064,17
14	EKUITAS AKHIR (14 = 1+2+3)	7.5.6.4	1.456.672.431.695,24	1.230.961.148.616,11



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

No	Uraian	Reff	2016	2015
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	165.728.727.971,64	117.141.189.348,88
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	(165.728.727.971,64)	(117.141.189.348,88)
3	Sub Total 1+2		0,00	2.446.832,00
4	Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran	7.5.2.3	50.056.646.893,57	165.728.727.971,64
5	Sub Total 3+4	7.5.2.4	50.056.646.893,57	165.731.174.803,64
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	s	0,00	(2.446.832,00)
7	Lain – Lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.5	50.056.646.893,57	165.728.727.971,64



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2016 Dan 2015

No	Urain	Reff	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan pajak daerah	7.5.1.1.1a	16.3385.557.500,00	10.426.486.744,50	63,63	9.466.053.249,00
4	Pendapatan retribusi daerah	7.5.1.1.1b	10.821.415.700,00	8.802.727.508,00	81,35	6.134.299.759,00
5	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah	7.5.1.1.1c	8.993.318.800,00	8.958.319.418,00	99,61	7.325.646.739,56
6	Lain – lain PAD yang sah	7.5.1.1.1d	74.451.907.417,00	67.438.416.844,63	90,58	51.901.932.723,76
7	Jumlah pendapatan asli daerah		110.652.199.417,00	95.625.946.515,13	86,42	74.827.932.471,32
8	PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	7.5.1.1.2				
9	Dana bagi hasil pajak	7.5.1.1.2a	13.733.295.000,00	15.479.528.043,00	112,72	7.788.205.400,00
10	Dana bagi hasil SDA	7.5.1.1.21	4.936.587.000,00	7.524.863.561,00	152,43	7.546.004.784,00
11	Dana alokasi umum	7.5.1.1.2.2	597.985.000,00	597.958.638.000,00	100,00	554.136.141.000,00
12	Dana alokasi khusus	7.5.1.1.2.3	394.907.816.000,00	315.075.996.933,00	79,78	175.822.130.000,00
13	Dana alokasi khusus	7.5.1.1.2.4	1.011.563.336.000,0	936.066.026.537,00	92,54	745.292.481.184,00
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan					
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	7.5.1.1.2b				
16	Dana otonomi khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana penyesuaian		84.824.326.000,00	84.824.326.000,00	100,00	142.866.885.000,00
18	Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya		84.824.326.000,00	84.824.326.000,00	100,00	142.866.885.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.c				
20	Pendapatan bagi hasil pajak	7.5.1.1.2.1	37.805.432.000,00	38.615.122.387,80	102,14	36.438.886.212,9
21	Pendapatan bagi hasil lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	7.5.1.1.2.2	14.136.079.077,00	14.435.069.877,00	102,12	0,00
23	Jumlah transfer pemerintah provinsi		51.941.511.077,00	53.050.192.264,80	102,13	36.483.886.212,94
24	Total pendapatan transfer		1.148.329.173.077,0	1.073.940.544.801,8	93,52	924.643.252.396,94
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
27	Pendapatan hibah	7.5.1.1.3a	11.908.409.000,00	10.755.773.000,00	90,32	846.593.000,00
28	Pendapatan dana darurat	7.5.1.1.3b	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan lainnya	7.5.1.1.3c	0,00	0,00	0,00	14.571.538.400,00
30	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah		11.908.409.000,00	10.755.773.000,00	90,32	15.418.131.400,00

31	JUMLAH PENDAPATAN		1.270.889.781.494,0	1.180.322.264.316,9	92,87	1.014.889.316.266,2
32	BELANJA	7.5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1	627.373.167.892,00	5574.280.008.073,00	91,54	527.255.788.079,00
34	Belanja pegawai	7.5.1.2.1a	230.997.354.074,00	217.347.450.174,00	94,09	190.321.364.917,50
35	Belanja barang	7.5.1.2.1b	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Bunga	7.5.1.2.1c	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Subsidi	7.5.1.2.1d	29.503.218.600,00	0,00	0,00	2.750.000.000,00
38	Hibah	7.5.1.2.1e	0,00	27.423.883.300,00	92,95	1.000.000.000,00
39	Bantuan sosial	7.5.1.2.1f	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bantuan keuangan	7.5.1.2.1g		0,00	0,00	0,00
42	jumlah belanja operasi		887.873.740.566,00	819.051.341.547,00	92,25	721.327.152.996,50
43	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
44	Belanja tanah	7.5.1.2.2a	1.735.790.000,00	908.280.000,00	52,33	638.436.640,00
45	Belanja peralatan dan mesin	7.5.1.2.2b	60.267.151.696,00	55.630.314.253,00	92,31	38.604046.490,00
46	Belanja gedung dan bangunan	7.5.1.2.2c	77.931.156.550,00	71.149.192.642,00	91,30	57.779.379.842,00
47	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	7.5.1.2.2d	330.407.395.410,00	278.668.971.653,00	84,34	113.700.499.695,00
48	Belanja aset tetap lainnya	7.5.1.2.2e	119.750.000,00	211.090.000,00	176,28	25.000.000,00
49	Belanja aset lainnya	7.5.1.2.2f	1.041.900.000,00	834.616.000,00	80,11	598.543.000,00
50	Jumlah belanja modal		471.503.143.656,00	407.402.464.548,00	86,41	211.345.905.667,00
51	BELANJA TAK TERDUGA		6.553.376.243,64	0,00	0,00	0,00
52	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.2g	6.553.376.243,64	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah belanja tak terduga		1.365.930.260.465,4	1.226.453.806.095,0	89,79	932.673.058.663,50
54	JUMLAH BELANJA					
55	TRANSFER	7.5.1.2.2h				
56	TRANSFER/BAGI HASIL KEDESA			0,00	0,00	0,00
57	Bagi hasil pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Bagi hasil retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Bagi hasil pendapatan lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bantuan keuangan ke desa (ADD)		67.105.216.000,00	66.957.506.300,00	99,78	31.626.272.150,00
61	Jumlah tranfer/bagi hasil ke desa		67.105.216.000,00	66.957.506.300,00	99,78	31.626.272.150,00
62	JUMLAH BELANJA DAN TRAFER		1.433.035.476.466,64	1.293.411.312.395,00	90,26	964.299.330.813,50
63	SURPLUS/DEBIT		(162.145.694.971,64)	(113.089.048.078,07)	69,75	50.589.985.454,76
64	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
66	Penggunaan silpa	7.5.1.3.1a	165.728.727.971,64	156.728.727.971,64	100,00	117.138.742.516,88
67	Pencairan dana cadangan	7.5.1.3.1b	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan	7.5.1.3.1c	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat	7.5.1.3.1d	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	7.5.1.3.1e	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bank	7.5.1.3.1f	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	7.5.1.3.1g	0,00	0,00	0,00	0,00

73	Pinjaman dalam negeri-obligasi	7.5.1.3.1h	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pinjaman dalam negeri-lainnya	7.5.1.3.1i	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara	7.5.1.3.1j	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah	7.5.1.3.1k	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya	7.5.1.3.1l	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Jumlah penerimaan		165.728.727.971,64	165.728.727.971,64	100,00	117.138.742.516,88
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.2				
80	Pembentukan dana cadangan	7.5.1.3.2a	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penyertaan modal pemerintah daerah	7.5.1.3.2b	3.583.033.000,00	2.583.033.000,00	72,09	2.000.000.000,00
82	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat	7.5.1.3.2c	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	7.5.1.3.2d	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank	7.5.1.3.2e	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga bukan bank	7.5.1.3.2f	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-obligasi	7.5.1.3.2g	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lainnya	7.5.1.3.2h	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara	7.5.1.3.2i	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah	7.5.1.3.2j	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya	7.5.1.3.2.k	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah pengeluaran	7.5.1.3.2.l	3.583.033,000,00	2.583.033.000,00	72,09	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		162.145.694.971,64	163.145.594.971,64	100,62	115.138.742.516,88
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	7.5.1.3.3	0,00	50.056.646.893,57	0,00	165.728.727.971,64



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

No	Uraian	Reff	2016	2015
1	ASET	7.5.3.1		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.a	47.134.624.065,57	163.426.863.373,64
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.1.b	1.709.704.861,00	1.578.410.101,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.1.c	4.579.724,00	0,00
6	Kas di Bendahar Kapitasi JKN	7.5.3.1.1.1.d	14.052.730,00	259.436.941,00
7	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.1.e	1.111.084.268,00	473.440.039,00
8	Kas Lainnya(Kas Dana BOS)	7.5.3.1.1.1.f	31.083.695,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek	7.5.3.1.1.1.g	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.2.a	10.668.784.510,59	9.248.082.255,59
11	Penyisihan Piutang Pajak		(3.986.084.999,65)	(490.982.606,20)
12	Piutang Pajak Netto		6.682.663.510,94	8.757.099.649,39
13	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.2.b	1.338.684.273,00	510.471.773,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		(294.252.402,30)	(23.454.367,73)
15	Piutang Retribusi Netto		1.044.431.870,70	487.017.405,27
16	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	7.5.3.1.1.2.c	6.777.616.532,00	3.765.013.063,42
17	Penyisihan Piutang Lain PAD Yang Sah		(67.776.165,32)	(37.626.394,58)
18	Piutang Lain-LainPAD Yang Sah Netto		6.709.840.366,68	3.725.013.063,42
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	7.5.3.1.1.2.d	0,00	0,00
20	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		0,00	0,00
21	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Netto		0,00	0,00
22	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.3.1.1.2.e	9.265.567.188,00	2.276.754.702,00
23	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
24	Piutang Transfer Pemerintah DaerahLainnya Netto		9.265.567.188,00	0,00
25	Piutang Pendapatan Lainnya	7.5.3.1.1.2.f	0,00	0,00
26	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
27	Piutang Pendapatan Lainnya Netto		0,00	0,00
28	Belanja di Bayar di Muka	7.5.3.1.1.2.g	65.959.303,75	0,00
29	Penyisihan Belanja di Bayar di Muka		0,00	0,00
30	Belanja di Bayar di Muka Netto		65.959.303,75	0,00
31	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	7.5.3.1.1.2.h	0,00	0,00
32	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
33	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto		0,00	0,00
34	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	7.5.3.1.1.2.i	0,00	0,00
35	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
36	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto		0,00	0,00
37	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.2.j	0,00	0,00
38	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
39	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Netto		0,00	0,00

40	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.3.1.1.2.k	0,00	0,00
41	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemeintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
42	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
43	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.1.2.l	72.646.000,00	72.646.000,00
44	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran		(72.646.000,00)	(72.646.000,00)
45	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran netto		0,00	0,00
46	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	7.5.3.1.1.2.m	1.295.967.874,59	1.300.413.769,59
47	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		(351.218.795,05)	(147.044.357,05)
48	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		944.749.079,54	1.153.369.412,54
49	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.2.n	171.516.000,00	568.431.000,00
50	Pennyisihan Piutang Lainnya		(149.691.000,00)	(302.053.250,00)
51	Piutang Lainnya Netto		21.825.000,00	266.377.750,00
52	Persediaan	7.5.3.1.1.3	12.744.920.033,32	4.715.259.103,07
53	Total Asset Lancar		87.485.085.696,50	187.119.041.540,33
54	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2		
55	Inventasi nonpermanen	7.5.3.1.2.a		
56	Pinjaman jangka panjang		0,00	0,00
57	Investasi dalam obligasi		0,00	0,00
58	Investasi dalam proyek pembangunan		0,00	0,00
59	Dana bergulir		819.753.981,00	780.180.152,00
60	Investasi nopermanen lainnya		0,00	0,00
61	Total Investasi Nonpermanen		819.753.981,00	780.180.152,00
62	Investasi permanen	7.5.3.1.2.b		
63	Penyertaan modal pemerintah daerah		68.198.849.133,37	25.948.899.085,29
64	Investasi permanen lainnya		0,00	0,00
65	Total Investasi Permanen		68.198.849.133,37	25.948.899.085,29
66	TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG		59.018.603.114,37	26.729.079.237,29
67	ASSET TETAP	7.5.3.1.3		
68	Tanah	7.5.3.1.3.a	227.630.156.908,00	215.620.110.935,00
69	Peralatan dan mesin	7.5.3.1.3.b	266.211.977.994	200.619.871.468,71
70	Gedung dan bangunan	7.5.3.1.3.c	542.409.936.464,83	471.847.587.505,49
71	Jalan, irigasi dan jaringan	7.5.3.1.3.d	789.333.280.788,97	558.454.341.579,37
72	Asset tetap lainnya	7.5.3.1.3.e	9.749.691.297,25	4.430.403.332,75
73	Konstruksi dalam pengerjaan	7.5.3.1.3.f	47.564.689.180,57	21.810.199.804,77
74	Akumulasi penyusutan	7.5.3.1.3.g	(682.112.858.590,92)	(549.600.459.168,12)
75	TOTAL ASSET TETAP		1.200.786.874.043,59	923.182.035.457,97
76	DANA CADANGAN	7.5.3.1.4		
77	Dana cadangan		0,00	0,00
78	Total Dana Cadangan		0,00	0,00
79	ASSET LAINNYA	7.5.3.1.5		
80	Tagihan penjualan angsuran	7.5.3.1.5.a	0,00	0,00
81	Penyisihan Tagihan penjualan angsuran		0,00	0,00
82	Tagihan penjualan angsuran netto		0,00	0,00
83	Tuntutan ganti kerugian daerah	7.5.3.1.5.b	96.888.148,00	0,00
84	Penyisihan Tuntutan ganti kerugian daerah		0,00	0,00
85	Tuntutan ganti kerugian daerah netto		96.888.148,00	0,00
86	Kemitraan dengan pihak ketiga	7.5.3.1.5.c	0,00	0,00
87	Asset tak berwujud	7.5.3.1.5.d	5.467.969.954,00	3.993.434.954,00
88	Amortisasi asset tak berwujud		(3.540.024.415,50)	0,00
	Asset tak berwujud netto		1.927.945.538,50	3.993.434.954,00
89	Asset lain – lain	7.5.3.1.5.e	124.686.126.771,28	128.926.057.860,39
90	TOTAL ASSET LAINNYA		126.712.960.457,78	132.919.492.814,39

97	TOTAL SELURUH ASSET		1.484.033.523.312,24	1.269.949.649.049,98
98	KEWAJIBAN	7.5.3.2		
99	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
100	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	7.5.3.2.1	14.286.903,00	9.422.483,00
101	Utang bunga	7.5.3.2.1.a	0,00	0,00
102	Bagian lancar utang jangka panjang	7.5.3.2.1.b	0,00	0,00
103	Pendapatan di terima di muka	7.5.3.2.1.c	13.517.708,33	587.500,00
104	Utang belanja	7.5.3.2.1.d	27.303.287.005,67	39.978.490.450,87
105	Utang jangka pendek lainnya	7.5.3.2.1.e	0,00	0,00
106	Jumlah kewajiban jangka pendek(94 s/d101)	7.5.3.2.1.f	27.331.091.617,00	38.988.500.433,87
107	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
108	Utang dalam negeri – sektor perbankan		0,00	0,00
109	Utang dalam negeri - obligasi		0,00	0,00
110	Premium (diskonto) obligasi	7.5.3.2.2	0,00	0,00
111	Utang jangka panjang lainnya		0,00	0,00
112	Jumlah kewajiban jangka panjang(112 s/d 115)		0,00	0,00
113	JUMLAH KEWAJIBAN (102+108)		27.331.091.617,00	38.988.500.433,87
114	EKUITAS DANA	7.5.3.3	1.456.672.431.695,24	1.230.961.148.616,11
	EKUITAS			
115	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.484.033.523.312,24	1269.949.649.049,98

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama Informan :

Jabatan :

- 1) Peraturan Pemerintah yang di pakai dalam penyusun laporan keuangan
- 2) Sebelum adanya PP 71 Tahun 2010 Pemerintah Menggunakan Peraturan Pemerintah.
- 3) perbedaan PP 71 Tahun 2010 dengan PP 24 Tahun 2005
- 4) Kelebihan dan kekurangan serta kendala dalam menerapkan PP 24 Tahun 2005 dengan PP 71 Tahun 2010
- 5) Sistem yang di pakai dalam munyusun Laporan Keaungan Berbasis Akrual
- 6) Pendapat atas Laporan Keuangan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) mengenai penerapan standar akuntansi yang berbasis akrual
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan
 - ❖ Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - ❖ Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - ❖ Neraca
 - ❖ Laporan Operasional
 - ❖ Lporan Arus Kas
 - ❖ Laporan Perubahan Ekuitas
- 8) Penerapan PP 71 Tahun 2010 sudah sepenuhnya di terapkan
- 9) Upaya yang di lakukan pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengoptimalisasikan PP 71 Tahun 2010
- 10) Pemerintah memiliki rasa kepuasan dalam bidang tugas dengan pelaksanaan SAP yang berbasis Akrual mendukung optimalnya kinerja pemerintah khusus bidang keuangan
- 11) Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 21 Mei 2018

Nomor : 070/289/KKBP-V/2018
Lamp. : -
Perihal : izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BPKD Kab. Takalar
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar nomor : 758/izn-5/C.4-VIII/V/37/2018, Tanggal 08 Mei 2018 Perihal izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NUR AISYAH
Tempat/Tanggal Lahir : Kasuarrang, 18 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mah. (S.1) UNISMUH Makassar
Alamat : Talakalabbua Desa Sawakong Kec. Galesong Selatan
Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

***"PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR"***

Yang akan dilaksanakan : 12 Mei s/d 12 Juli 2018
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

a.n. Kepala,
Kasi/Ketahanan Sospol

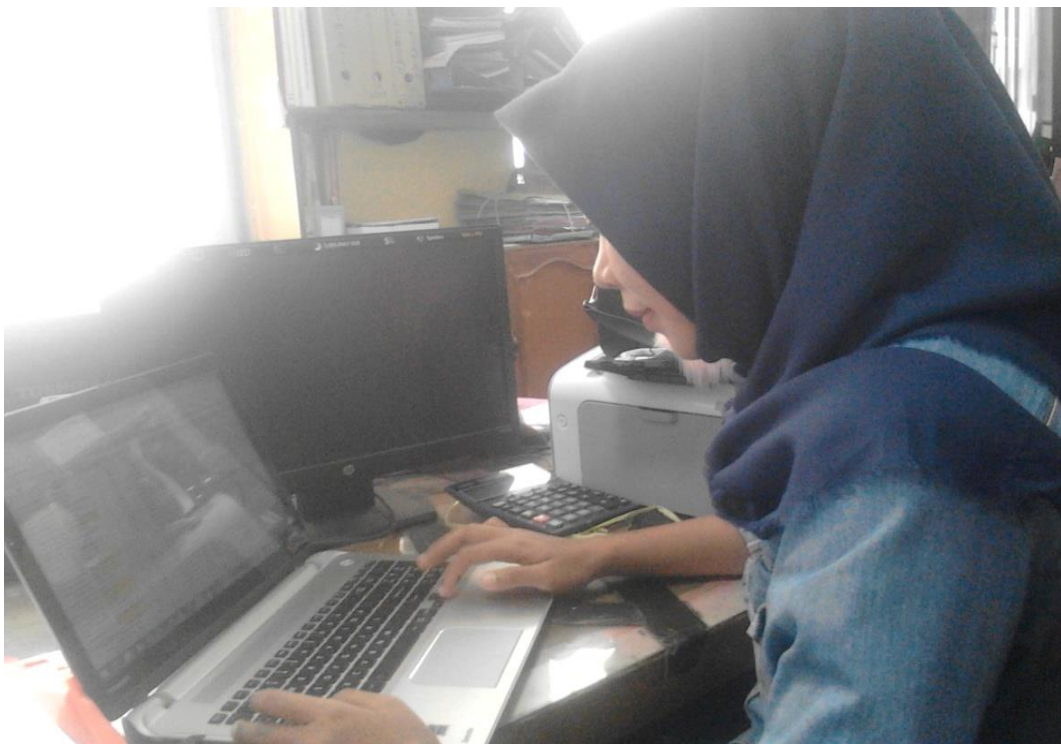
MUHAMMAD YUSUF, SE., MSi

Pangkat : Penata Muda Tk.I

NIP. 19830110 200801 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Sdr.(i) **NUR AISYAH** di tempat.



RIWAYAT HIDUP



NUR AISYAH. Lahir di Kasuarrang, pada tanggal 18 Januari 1995. Anak kedua dari dua bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Kamaruddin dan Halima. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Sawakong Towa Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Cambajawaya Kecamatan Bontonompo Sealatan Kabupaten Gowa dan tamat tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1).